

## BAGIAN KEDUA

### ANGGOTA DPR YANG TERHORMAT

#### **Sebuah Setting**

Suatu hari, 1999, saya menatap gedung menjulang tinggi di kawasan Senayan Jakarta. Wajah gedung bak buku terbuka yang menurut cerita merupakan karya besar Soekarno untuk menyaingi PBB, terlihat anggun dari jalanan. Pesona estetik yang tetap menarik hingga kini. Puncaknya pernah ditaklukan ribuan mahasiswa di tengah dentum gelora perubahan 1998. Kebanggaan yang luar biasa, seperti kebanggaan menaklukan simbol kekuasaan negara. Rasanya hari-hari itu mereka menjadi pahlawan.

Memasuki halamannya terbawa suasana penuh kewibawaan. Setiap pintu yang dilewati membuat kami merasa menjadi orang penting. Banyak orang berseragam mengantarkan kami masuk menemui pimpinan DPR/MPR. Wakil rakyat yang menemui kami itu sangat berwibawa, mengenakan jas hitam, dan sambil mengangguk-angguk ia mendengarkan secara cermat hal-hal yang kami sampaikan, sesekali ia menanyakan sesuatu. Saya sendiri sudah lupa apa yang ditanyakannya hari itu. Akhir dari pertemuan itu, kami berpose di depan gedung karya Soekarno itu. Kawan saya dengan bangga menyimpan foto itu sebagai bukti sejarah pernah berkunjung ke gedung DPR. Rasanya kami menjadi orang yang benar-benar penting hari itu.

Setelah hari itu, saya selalu merasa setiap orang yang ada dalam gedung ini adalah orang penting. Apalagi para wakil rakyat itu, sebut saja anggota DPR. Mereka pasti berpenampilan berwibawa dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat, seperti anggota DPR yang pernah menemui kami dulu.

Namun saat ini suasana itu terasa berbeda. Kali ini setiap kali datang ke gedung DPR, setiap kali pula ada rasa segan timbul di hati. Gedung ini terasa sangat angkuh, bahkan keangkuhannya tetap terasa walau pun sudah tiga tahun lebih waktu terbanyak saya berada di gedung DPR ini. Gedungnya tinggi-tinggi menjulang ke langit, kokoh dan kuat sehingga menimbulkan rasa segan. Belum

lagi banyaknya petugas-petugas pengamanan mulai dari pintu gerbang hingga seluk-beluk di dalam gedung.

Sejak turun dari bis kota yang berdebu dan penuh sesak, saya harus menghadapi tembok pagar yang sangat tinggi, di balik pagar itu beberapa petugas pengamanan dalam, selanjutnya disebut pamdal, memeriksa satu per satu orang yang datang. Bagi mereka yang datang sebagai tamu pasti akan diminta KTP-nya, sementara bagi para pekerja di DPR yang mungkin saja dikenali dari ID Card yang selalu harus digunakan akan dipersilakan masuk tanpa pengamanan berarti. Pengamanan gerbang depan diperketat bila ada demonstrasi. Pintu pagar gerbang depan ditutup rapat, sehingga mobil tidak dapat masuk. Pintu pagar samping untuk masuk pejalan kaki juga ditutup rapat dan dijaga beberapa orang. Untuk masuk ke dalam harus menunjukkan ID atau pengenalan dan barulah pintu dibuka oleh petugas. Setelah lewat gerbang, ada lagi pemeriksaan di pos polisi depan dan setiap pejalan kaki yang masuk gerbang depan harus melewati pemeriksaan metal detector. Begitu mencapai gedung Nusantara baik Nusantara I hingga Nusantara IV akan bertemu kembali dengan pamdal, untuk tamu harus menyerahkan KTP, menunjukkan ID Card dan sekali lagi melewati *metal detector*. Nusantara I adalah tempat perkantoran anggota DPR RI, untuk masuk ke dalam ruang-ruang kantor kita harus menggunakan lift, dan ketika akan naik lift ada minimal 2 bahkan kadang kala 4 orang pamdal yang akan memisahkan antara tamu dan pekerja dengan anggota DPR melalui sebuah sekat kaca. Dan sekali lagi kita akan menemui pamdal di setiap lantai perkantoran dari lantai 2 hingga lantai 23. Jumlah mereka tidak pernah kurang dari 2 orang. Apabila kita melalui pintu gerbang belakang, banyaknya pos pemeriksaan pamdal juga sama saja. Selama ini sering saya naik bus kota dan melewati semua pos pengamanan sebelum mencapai kantor anggota DPR. Baru kali ini saya menghitung bahwa dari gerbang hingga ruangan anggota DPR, saya harus bertemu 6 pos pengamanan. Betapa banyak pos pengamanan pamdal yang saya temui hanya dalam sekali waktu saja.

Rasa segan dan enggan bertemu pamdal itu masih diperburuk dengan keharusan berjalan kaki sepanjang krang lebih 1 kilometer dari pintu samping gerbang depan hingga gedung Nusantara I tempat para anggota DPR berkantor.

Jadi bila anda adalah tamu yang tidak memiliki kendaraan pribadi baik itu mobil atau pun motor, atau anda adalah penumpang kendaraan umum, maka bersiaplah untuk berkeringat-keringat dahulu sebelum mencapai kantornya anggota DPR.

Nah bila kita sudah mencapai lantai yang kita tuju, di sana pamdal akan bertanya siapa dan untuk keperluan apa ditemui. Kita akan diminta mengisi form tamu. Petugas pamdal akan masuk ke dalam ruang yang dituju, dan hanya bila yang bersangkutan berkenan menerima, pamdal akan mempersilakan kita untuk masuk. Bila yang bersangkutan tidak ada atau tidak bersedia menemui, atau kita harus menunggu, kadang-kadang pamdal dengan senang hati akan mempersilakan kita kembali ke lantai 1.

Hampir setiap pagi demikianlah ritual perjalanan masuk ke gedung DPR. Rasanya memang menjadi segan masuk ke gedung ini. Saya bisa membayangkan betapa segannya rakyat datang ke gedung ini dengan panjangnya perjalanan, banyaknya pengamanan, pos pemeriksaan, hingga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab rakyat sebelum akhirnya sampai di kantor anggota DPR. Selain segan, saya dapat menduga rakyat biasa juga akan takut datang ke gedung DPR. Wakil rakyat di DPR menjadi tidak mudah diakses oleh rakyat, sulit karena jarak yang berlapis-lapisnya membatasi akses rakyat kepada para wakilnya di DPR.

Pengamanan yang banyak itu akan bertambah bila pejabat pemerintah datang. Dalam rapat paripurna bila ada pejabat setingkat Menteri hadir, pengamanan di depan Nusantara II diperketat. Belasan pamdal akan berjaga di depan pintu kaca ke Nusantara II. Pengamanan ditingkatkan lagi bila Presiden datang ke DPR. Dari sejak pintu gerbang belakang, setiap orang yang datang, setiap motor, mobil, dan taksi diperiksa. Pengamanan tak hanya dilakukan oleh pamdal DPR tetapi ditambah juga oleh aparat TNI yang siap berjaga-jaga dengan memakai seragam hijau loreng dan menyandang senjata laras panjang. Mereka ditempatkan bahkan hingga di sudut-sudut gedung, taman, dan berbagai tempat lainnya di kompleks gedung DPR Senayan ini. Jangankan bagi masyarakat umum yang hendak datang mengadu nasib, bahkan yang telah bertahun-tahun bekerja di sana pun merasa segan dengan situasi pengamanan ketat ini.

Seperti pagi ini, saya naik sepeda motor, pagi kira-kira lewat pukul 7.30. Saya melewati pengamanan paling luar, lalu pos pemeriksaan motor. Saya melihat regu-regu pengamanan dalam (pamdal) sedang latihan pagi di halaman luar tempat parkir mobil tamu di sisi kiri Nusantara I. Biasanya mereka olah raga, tak jarang lari-lari mengelilingi kompleks DPR Senayan sambil bernyanyi lantang. Kali ini saya melihat jumlah personel pamdal yang semakin banyak. Dugaan saya, ada penambahan jumlah personel. Personel pamdal ini sebenarnya tenaga kerja *out resourcing*, demikian menurut penjelasan dari para pamdal yang sering ngobrol di parkir motor bersama saya. Saya juga melihat banyak sekali aparat berseragam hijau loreng membawa senapan laras panjang. Rupanya hari ini Presiden datang ke DPR untuk menyampaikan nota keuangan.

Saya memarkir motor saya di tempat parkir motor yang terletak jauh di ujung kompleks, dekat kantin makan luar. Lalu jalan kaki lumayan jauh dari tempat parkir motor ke gedung Nusantara I. Nusantara I ini adalah kompleks gedung perkantoran semua anggota DPR. Semua anggota DPR RI kecuali pimpinan DPR/MPR dan DPD berkantor di gedung ini. Pimpinan DPR/MPR berkantor di gedung Nusantara III, sementara DPD dibangunkan sebuah gedung perkantoran tersendiri. Lantai bawah Nusantara I, terdapat parkir mobil. Kemudian di lantai 1 adalah ruang-ruang sidang dan sebagian sekretariat komisi dan Baleg, lantai 2 untuk staff ahli, bagian listrik, P3DI atau bagian untuk urusan informasi, komputer, dan internet, lantai 3 sebagian ruang pengendali internet dan salah satu fraksi, seterusnya lantai 3 hingga 23 adalah kantor-kantor anggota DPR disusun per fraksi.

Saya melewati tempat parkir untuk mencapai lift lantai dasar. Di tempat parkir mobil tersebut mobil anggota DPR berjajar di sana. Saya rasa hampir semua merk mobil ada di sana. Biasanya yang berjejer di situ memiliki trend, dulu sedang tren *Terrano*, banyak sekali *terano* di parkir, saat ini tampaknya sedang trend *harrier*. "Seperti show room mobil mewah," kata seorang staf suatu kali ketika berjalan bersama saya. Sebutlah merk mobil mewah, hampir bisa dipastikan ada. Honda *jazz*, kijang, adalah merek paling jarang di sini, tapi anda

bisa lihat *harrier, ford, apv, pajero, kingsroad terrano*. Itu merk-merk mobil mewah dan harganya mencapai ratusan juta rupiah.

Begitu mencapai lantai parkir yang juga merupakan lantai dasar gedung Nusantara I, saya kecewa, sebab dilarang masuk melewati pintu sebelah kiri. "Untuk anggota DPR saja," kata pamdal sambil mempersilakan saya mengambil pintu yang di sebelah kanan, dan saya dengan bersungut-sungut berjalan memutar. Saya enggan menggunakan pintu kanan karena di sebelahnya sedang dibangun lift baru, sehingga sangat berdebu. Tapi sayang, karena bukan anggota DPR, maka saya harus rela pada pembagian jatah lift di tempat berdebu itu. Saya punya cerita sendiri soal lift itu. Rupanya akses antara anggota DPR dengan yang bukan anggota DPR termasuk pekerja yang ada di DPR dibedakan, bahkan termasuk akses terhadap pintu masuk dan lift.

### Lift

Perkantoran anggota DPR ada di gedung Nusantara I kompleks DPR/MPR. Di sini semua anggota DPR berkantor. Pimpinan DPR, MPR dan DPD tidak berkantor di sini. Di Nusantara I ini terdapat 5 (lima) lift utama, 1 lift barang, dan saat ini telah ditambah 2 lift baru. Mulanya (2005-2006) semua lift bisa dipakai siapa saja. Jadi antara tamu, anggota DPR, pekerja, dan lain-lain dapat menggunakan seluruh lift bersama-sama. Sese kali saya mendengar keluhan anggota DPR karena lift yang ditumpanginya bersama beragam jenis orang itu sangat penuh sesak. Agaknya mereka merasa tak nyaman.

Selain soal ketidaknyamanan, ada juga sebenarnya persoalan keselamatan. Suatu ketika seorang kawan saya yang menjadi asisten pribadi di salah satu fraksi pingsan di dalam lift. Hari itu ia sedang sakit, dan ketika hendak pulang ia ikut salah satu lift yang cukup penuh. Celakanya lift itu anjlok beberapa sentimeter dari dasar lantai dan secara otomatis tak dapat terbuka. Diduga karena jumlah orang di dalam lift melebihi kapasitas lift. Mungkin karena udara di dalam lift yang penuh itu terasa sesak, maka kawan saya pingsan seketika. Setelah beberapa saat, berhasillah pintu lift dibuka. Segera saja petugas menolongnya. Rupanya kejadian anjloknya lift itu bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir.

Akibat kejadian tersebut menguatlah desakan untuk penambahan lift di Nusantara I (satu).

Tuntutan kenyamanan untuk anggota DPR dan keselamatan pengguna lain mendapatkan jawaban dengan kebijakan penyekatan akses lift dan pembangunan dua lift tambahan. Yang terlebih dahulu dipenuhi adalah kebutuhan kenyamanan anggota DPR, sementara penambahan lift dilaksanakan agak belakangan. Maka awal 2007 lobby Nusantara I dan lantai parkir disekat. Dari 5 lift yang ada, 4 lift (2 di kanan, 2 di kiri) khusus untuk anggota DPR. Lift untuk staf DPR, staf kesekjenan, tamu, dan lain-lain hanya boleh menggunakan 1 lift untuk dan 1 lift barang.

Mulanya suatu hari, entah mengapa tiba-tiba saja lobby Nusantara I disekat dengan menggunakan papan kayu yang tebal, memisahkan 4 lift untuk anggota DPR dengan 1 lift orang untuk staf dan tamu, serta 1 lift barang. Mungkin pemisahan ini untuk mengantisipasi agar anggota DPR mendapatkan kenyamanan menggunakan lift sehingga tak berdesak-desakan dengan tamu lainnya. Mungkin juga mereka khawatir anggota DPR jadi korban lift anjlok karena kelebihan beban. Maka dipisahkanlah akses terhadap lift tersebut. Tentu saja ini mengatasi soal kenyamanan anggota DPR, tetapi membuat penumpukan antrean orang di lift seberang yang diperuntukan bagi tamu dan barang.

Kebijakan pemisahan lift berkait dengan perubahan *setting* ruangan lobby Nusantara I. Ruang lobby rupanya diset ulang, dibuat satu ruang lobby khusus anggota DPR, dilengkapi empat pasang sofa dan televisi. Tak sembarang tamu bisa masuk ruang lobby khusus itu. Di bagian depan lobby khusus ditempatkan pamdal, biasanya 2 sampai 4 orang. Di bagian belakang ada sekat untuk lift. Jadi kalau anggota DPR turun dari lantai atas, sampai di lobby, mereka akan melewati ruang lobby khusus sehingga tak terganggu dengan tamu.

Sekat lift itu mula-mula terbuat dari kayu, dengan demikian saya tidak bisa melihat ke bagian sebelah. Jadi ketika pertama kali sekat itu dibangun, hari itu semua orang ribut, sebab di lift yang hanya 1 (satu) kami harus mengantri hingga 30 menit. Lift itu harus naik dulu hingga lantai 23 baru turun lagi. Bila bersedia, ada 1 (satu) lift barang yang berdebu dan bau apek itu. Lift itu penuh sesak orang,

persis seperti naik KRL. Bagi yang tidak sabar, silakan naik tangga. Hal itu pernah saya alami, saya terengah-engah sebab harus naik tangga 5 lantai. Dengan kesal saya mengirim sms (*short message system*) kepada sekretaris salah satu fraksi yang juga merupakan kenalan dekat saya, untuk menyindir perilaku kesekjenan yang membuat sekat bagi kepentingan kenyamanan anggota DPR. Dia menjawab, "saya juga naik lift barang," mungkin maksudnya bersolidaritas dengan nasib pengguna lift lain. Tapi saya tak mau kalah, saya jawab lagi, "saya naik tangga 5 lantai!" komplit sudah kekesalan saya.

Besok harinya sekat kayu untuk ruang lift dibuka. Saya berharap itu karena perintah sekretaris salah satu fraksi yang saya sindir kemarin. Sebab kesekjenan DPR memang akan memperhatikan teguran atau permintaan anggota DPR. Rasanya senang sekali bisa melewati lift dengan normal kembali. Tapi ternyata itu tak bertahan lama, beberapa hari kemudian, sekat dari kayu itu diubah, kali ini jadi sekat kaca. Menurut saya ini lebih buruk daripada sekat kayu kemarin, sebab dengan sekat kaca orang dapat melihat bagian di seberang sekat. Rasanya seperti terdiskriminasi. Pernah suatu kali saya ngantri di depan lift tamu dan barang, penuh sekali orang mengantri, sementara di bagian seberang sekat kaca itu bisa terlihat ruangan sepi. Saya melihat banyak orang yang gelisah menunggu lift tamu dan barang. Mereka menggerutu melihat situasi yang kontras antar lift tamu dan lift khusus anggota DPR. Ketika mula-mula kebijakan sekat itu diterapkan, salah seorang pegawai di DPR yang sedang mengantri bersama saya menyeletuk, "Duh liftnya kurang memang, sebaiknya nanti setiap anggota DPR disediakan lift satu-satu per orang, bisa cepat."

Rasa bahwa wakil rakyat berbeda dengan rakyat itu sangat terasa, dengan nyaman para anggota DPR mengakses lift yang nyaman dan tidak penuh bahkan dengan pengawalan pamdal yang menjaga ruang tunggu lift selalu nyaman di mana di sana tak banyak orang mengantri, sementara yang bukan anggota DPR, harus menunggu antrian yang penuh dan penjagaan pamdal agar tidak menerobos sekat.

Memang sekat kaca di ruang tunggu lift itu terdapat pintu yang bisa digeser. Tapi di sana ditempatkan pamdal, biasanya dua pamdal di muka sekat

tamu dan dua pamdal di seberang. Pamdal di sekat tamu bertugas menutup akses tamu untuk masuk ke ruang tunggu lift anggota DPR, sementara pamdal di seberangnya bertugas melayani anggota DPR, memencet tombol naik atau turun serta membukakan pintu lift. Untuk tamu, begitu turun dari ke lobby, keluar lift, mereka akan dipersilakan keluar dari pintu sekat kaca yang dapat digeser, sehingga tamu tidak dapat melewati ruang lobby khusus DPR untuk lewat dan harus berjalan memutar untuk ke lobby depan Nusantara I, kecuali bagi tamu yang memang hendak menunggu di ruang lobby.

Saya mulanya mengira, kalau pemberlakuan sekat hanya ada di lantai lobby untuk mengatur akses lift, jadi saya pun sering bisa mensiasatinya dengan naik lift dari lantai parkir, sehingga bisa mengakses semua lift dengan leluasa. Saya hanya perlu turun tangga dari lobby ke parkir lalu naik lift dari situ. Rupanya akal-akalan itu tak bisa dijalankan lagi, sebab sekat pun juga dibangun di lantai parkir. Akhirnya bila naik lift dari lantai parkir tetap saja harus menunggu 1 lift orang dan 1 lift barang. Buruknya, ketika itu sedang ada pembangunan lift tambahan, sehingga ruang tunggu lift lantai parkir untuk tamu, staf dan pekerja sangat berdebu. Lift tambahan itu sendiri dibangun 2 unit, sebab lift lama sering rusak karena terlalu banyak beban. Sayangnya pembangunan lift tambahan itu berlangsung lama. Saya kira, sudah hampir satu tahun, pembangunan lift itu belum juga selesai.

Jadi saya lihat beberapa tamu dan staf mensiasati aturan baru soal sekat lift itu dengan mengomel lama-lama pada para pamdal yang menjaga, atau membujuk pamdal di bagian pintu sekat untuk anggota DPR, maklum sudah lama saling kenal, jadi biasanya mereka membuka akses ke dalam ruang tunggu lift untuk anggota DPR. Pamdal biasanya melihat keadaan, jika anggota DPR tidak banyak barulah boleh masuk bisa masuk, bila anggota DPR banyak terpaksa ditolak masuk dan harus rela mengantri di tempat berdebu. Siasat tidak berlaku jika musim pengamanan ketat ini, biasanya di paripurna pembukaan atau bila ada kunjungan Presiden, seperti yang saya alami hari ini. Saya terpaksa menutup hidung karena debu sambil bersungut-sungut menunggu lift di bagian staf/tamu.

### **Logo, Pin, dan ID Card**

Anggota DPR itu berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Tanda pembedanya sangat mudah dilihat, pertama adalah penggunaan logo mobil, dan kedua adalah penggunaan pin.

Sangat mudah mengenali anggota DPR, yaitu dengan melihat mobil mereka. Semua anggota DPR punya mobil. Sebuah bank di kompleks DPR menawarkan kredit mobil dan kebanyakan anggota DPR mengambil kredit mobil yang ditawarkan bank tersebut. Dalam setiap mobil ditandai dengan logo DPR, biasanya di kaca depan mobil ditempel stiker logo DPR, di bumper depan mobil dan di bumper belakang juga kadang dipasang logo DPR. Di luar anggota DPR dilarang menggunakan logo tersebut. Jadi logo adalah penanda identitas si pemilik mobil yang merupakan anggota DPR. Logo ini kadang menimbulkan masalah. Beberapa media berita internet pernah menuliskan kelakuan pengendara mobil berlogo DPR, salah satunya melanggar aturan 3in 1.

Biasanya mobil berlogo DPR diperkenankan melintas di depan lobby Nusantara I. Begitu melihat logo mobil anggota DPR, maka para pamdal akan buru-buru membukakan pintu mobil dan mempersilakan anggota DPR keluar dari mobil atau pun sebaliknya masuk ke dalam mobil. Jadi logo itu berfungsi sebagai penanda identitas pula yang sekaligus menunjukkan status sosial sebagai anggota DPR, maka dengan melihat penanda identitas itu para pamdal bergegas memberikan layanan. Tindakan pamdal yang segera membukakan pintu mobil anggota DPR adalah suatu tindakan pelayanan yang hanya dilakukan pada pengguna identitas yang notabene dengan identitas itu status sosialnya ditampilkan. Layanan serupa tidak diberikan kepada orang lain.

Ada pula penanda identitas lainnya selain logo mobil, yaitu pin lambang garuda. Pin itu hanya boleh dikenakan anggota DPR, sebagai penanda identitasnya. Untuk hal ini, bahkan ada larangan tertulisnya. Hanya boleh dikenakan anggota DPR. Biasanya dikenakan di kerah jas, di bagian atas blazer, atau di bagian atas baju yang mudah terlihat, sehingga para pekerja, petugas keamanan, dan publik mengetahui bahwa yang mengenakan pin adalah anggota DPR. Pin itu juga membebaskannya dari kewajiban pemeriksaan *metal detector*,

dan lebih dari itu mendapatkan perlakuan khusus yang tentu saja berbeda dengan perlakuan kepada staf atau pekerja, dan tamu di DPR. Bagi orang awam, hanya dengan melihat pin, mereka dapat mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah anggota DPR.

Lain lagi dengan pekerja dan staf di DPR. Mereka memiliki *ID Card* yang biasanya dikalungkan di leher. *ID Card* itu penanda identitas mereka, misalnya PNS kesekjenan dan aspri atau asisten anggota. Tanpa *ID card*, sulit mendapatkan akses masuk ke ruang perkantoran anggota DPR. Fungsi lain *ID card* asisten pribadi digunakan untuk mengambil honorariumnya di bagian keuangan. Mulai tahun ini (2007) ID diganti. Tidak lagi menggunakan kertas melainkan dibuat khusus agar bisa digunakan untuk akses pintu magnetik antar lantai. Fotonya langsung otomatis tercetak di ID itu bukan ditempel. Hanya dengan ID tersebut para staf DPR, PNS, aspri, staf ahli bisa masuk ke dalam koridor lantai-lantai.

Sementara itu untuk tamu diberikan ID tamu, namun tentu saja tidak dapat digunakan untuk akses membuka pintu magnetik koridor lantai-lantai. Oleh karena itu, di setiap lantai tetap saja ditempatkan pamdal, bertugas membuka pintu untuk anggota DPR dan mengatur para tamu yang datang. Bila anda datang ke gedung Nusantara I lantai sekian, maka anda akan diminta menunggu oleh pamdal, kemudian pamdal akan masuk ke ruang anggota yang dituju, dan bila anggota yang bersangkutan berkenan menerima maka barulah anda diperkenankan masuk.

Adapun anggota DPR, dibuatkan kartu ID parkir. Hanya dengan ID parkir tersebut mobil dapat melewati penjagaan pintu gerbang depan dan pintu gerbang belakang kompleks DPR, serta mengakses tempat parkir di lantai dasar gedung Nusantara I. Kalau anda adalah tamu, silakan parkir di bagian belakang kompleks gedung DPR yaitu dekat Nusantara I, tetapi di parkir luar.

Saya mengamati bahwa rupanya kebijakan pergantian ID itu bersamaan waktunya dengan kebijakan pengamanan gedung yang ditingkatkan. Jumlah personel pamdal semakin banyak. Unit perkantoran kecil untuk pamdal dibangun di bagian belakang kompleks gedung DPR. Lalu dibangun pula secara sederhana

pos pemeriksaan kendaraan roda dua. Di pos tersebut ditempatkan beberapa pandal.

Kalau saya mau masuk, saya harus menunjukkan ID saya, kecuali kalau saya sedang tak enak hati, terkadang main terobos sambil berteriak menyebutkan ruangan yang akan saya tuju. Yang paling sering saya melihat pandal menghentikan kendaraan motor itu, meminta pengendaranya memarkir motor ke samping untuk diperiksa lagi, sepertinya mereka itu yang dikategorikan sebagai tamu.

Pemeriksaan mobil dilakukan juga. Setelah kita masuk ke kompleks DPR di bagian belakang, untuk mobil dibelokkan ke kanan, untuk motor ke kiri. Untuk mobil, ada dua jalur. Jalur tersebut digunakan oleh anggota DPR, mudah menandainya dengan logo. Kalau mobil DPR, sang sopir akan membuka jendela dan mengeluarkan ID card, ID itu ditempelkan di magnet lalu pembatas akan terbuka. Bagi mobil umum atau taksi, akan ada pemeriksaan bagasi, dulu waktu pembatas itu dibuat dan kebijakan pengamanan diterapkan mula-mula, taksi dan mobil umum di luar mobil anggota DPR dan pejabat tidak diperkenankan masuk dalam lajur yang ada. Taksi hanya boleh masuk bila taksi itu memuat anggota DPR sebagai penumpangnya. Mobil atau taksi akan diperiksa dengan detektor, kadang-kadang pintu mobil bahkan harus dibuka, lalu mobil/taksi diarahkan ke parkir luar gedung. Pengendaranya, tamu/pengunjung harus turun dari mobil, berjalan melintasi parkir lalu baru mencapai lobby Nusantara I. Untuk yang ini para tamu itu sering marah-marah, saya salah satu yang kesal dengan hal ini. Sopir taksi juga sering mengeluh, sebab kalau mereka tidak dapat melintasi lobby, maka mereka tidak dapat menarik penumpang. Para penumpang ogah jalan kaki sampai depan gerbang pintu belakang.

Rupanya kebijakan itu akhir-akhir ini diubah. Asal menunjukkan ID walaupun ID staf, maka taksi yang ditumpangi boleh masuk melewati pembatas. Tentu saja pemeriksaan bagasi tetap berlangsung. Sementara itu taksi tanpa penumpang, tetap tidak boleh masuk ke dalam kompleks lebih jauh, taksi tersebut akan dibelokkan ke parkir luar.

Jadi logo, pin, dan *ID card*, sebenarnya berfungsi bukan saja sebagai penanda identitas. Penanda identitas itu menentukan perlakuan yang akan diterima penggunanya. Namun juga penanda identitas itu berlaku untuk mempertegas bentuk-bentuk perbedaan status antara anggota DPR dengan pekerja DPR, dan juga para tamu.

### **Kantin**

*Setting* berikutnya yang perlu dikenali adalah tempat makan. Urusan makan ternyata bukan sekedar urusan perut yang bisa dipenuhi di setiap tempat karena lapar. Urusan makan adalah juga urusan pilihan tempat, di kompleks ini ada beberapa tempat makan. Tempat makan populer bagi para tamu termasuk para makelar proyek yang sering saya jumpai berada di sana, pekerja (PNS), staf DPR, dan juga wartawan media massa, dikenal dengan kantin 'tenda biru.' Sebenarnya tidak ada tenda biru di kantin itu, hanya penyebutan saja. Para staf menganggapnya sebagai tempat makan kelas bisnis. Standar harga satu porsi rata-rata Rp 8.000,- hingga Rp 10.000,-. Untuk kelas ekonomi terdapat kantin kecil di lantai parkir Nusantara 1. Rata-rata yang memilih makan di sana itu kelasnya para sopir, cleaning servis, dan beberapa staf yang cekak duitnya, rata-rata satu porsi makan 5.000,-. Sementara untuk kantin eksekutif ada di lantai 1 Nusantara 1, namanya kafetaria, kira-kira sekali makan paling sedikit Rp 20.000,- per orang bahkan seringkali harganya lebih dari itu. Kafe ini kebanyakan dikunjungi tamu yang akan melobby anggota DPR untuk banyak urusan termasuk di dalamnya para makelar proyek, tetapi ada juga aktivis LSM dan juga para staf anggota yang sesekali memilih makan di sana. Kadang juga anggota DPR memilih untuk menjamu para tamu mereka dari daerah dengan makan di kafetaria. Biasanya bila anggota DPR memilih makan di kafetaria, beberapa dari mereka lebih suka makan di ruangan khusus yang terdapat di dalam kafetaria. Anggota DPR juga sesekali pesan makan untuk diantarkan ke ruangan kantornya. Tetapi tak jarang juga mereka memilih tempat makan di luar.

Ada sebuah hotel yang dekat dengan Senayan dan biasanya saya sering melihat satu dua anggota DPR mampir siang-siang di hotel tersebut untuk makan

siang. Tapi ada tempat makan minum yang lebih bergengsi terutama untuk keperluan pertemuan-pertemuan informal atau lobby-lobby. Hotel dan kafe menjadi pilihan tempat tersebut. Masing-masing anggota DPR saya duga punya tempat favorit untuk itu, misalnya seorang mantan pimpinan komisi memilih Hotel Le Meridien sebagai tempatnya minum dan membuat janji pertemuan dengan koleganya.

Urusan makan bukan hanya sekedar kebutuhan fungsional, orang lapar butuh makan, melainkan lebih dari itu. Makan juga soal selera tempat dan kepantasan dengan posisi yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Apalagi bila sudah menyangkut keperluan untuk makan bersama orang lain atau kolega. Urusan makan bagi anggota DPR bukan soal fungsional, menghilangkan lapar, melainkan melibatkan juga selera konsumsi yang sesungguhnya ditujukan lebih untuk menegaskan posisi kelasnya di hadapan pihak lain atau koleganya. Bourdieu (1984), menerangkan pilihan perilaku konsumsi ini dengan penjelasannya mengenai selera konsumsi "*the taste of consumption.*" Dalam "*Distinction,*" ia menyusun suatu penelitian mengenai selera konsumsi setiap lapisan kelas sosial. Lapisan paling bawah menunjukkan pilihan selera konsumsi secara fungsional, sementara kelas sosial elite menampilkan selera konsumsi yang jauh dari soal pemenuhan fungsional. Selera konsumsi kelas elite dituntun oleh hasrat untuk merepresentasikan status sosial mereka. Dengan sengaja mereka membuat standar yang berbeda dengan standar masyarakat kebanyakan. (Bourdieu, 1984: 226).

Lain tempat makan, lain pula peralatan makan. Prinsipnya anggota DPR mesti berbeda dengan orang lain, jadi soal gelas yang dipakai pun harus berbeda. Seperti seorang informan saya, Ibu DD, suatu hari pada pukul 13.15 wib, ia kedatangan tamu yang telah ditunggunya. Mulanya 3 orang masuk, lalu menyusul satu orang lagi. Ia kemudian memanggil stafnya, seorang perempuan kecil mungil." Nin Nin, ada indocafe tho? Atau apa mau minum apa, atau mau makan di kafetaria yuk." Tamunya menolak halus. Nin yang sudah di depan pintu ruang anggota masuk untuk menawarkan minuman pada tamu. Satu per satu tamu kemudian menyebutkan permintaan minuman. Nin sibuk menyajikan teh dan kopi

sesuai permintaan para tamunya. Hanya saja untuk Ibu minuman sudah terlebih dahulu dibuatkan sebelumnya. Gelas untuk Ibu tentu berbeda dengan gelas untuk tamu. Untuk tamu minuman disajikan dalam cangkir-cangkir coklat ukuran kecil. Sementara untuk Ibu, menggunakan gelas cangkir besar, warnanya putih. Itu gelas khusus untuk Ibu DD. Gelas cangkir putih besar itu tidak boleh dipakai orang lain, khusus untuk Ibu DD.

Lift, logo, pin, ID, tempat makan, bahkan peralatan makan menunjukkan suatu beda simbolik antara masyarakat kebanyakan dan anggota DPR. Logo, pin, dan ID, bukanlah sekedar persoalan implikasi akses dan *previledge*, melainkan juga penegasan perbedaan simbolik dari sebuah status kelas yang berbeda antara anggota DPR dengan masyarakat kebanyakan. Dengan menggunakan logo dan pin, maka anggota DPR secara khusus mendapatkan *previledge* dan juga pelayanan lainnya. Hanya anggota DPR yang begitu mobil berlogonya masuk dalam halaman lobby, maka pandal akan terburu-buru membuka pintu mobil. Perlakuan tersebut tidak mungkin dilakukan terhadap mereka yang bukan anggota DPR.

Pilihan tempat makan yang dianggap pantas bagi anggota DPR maupun untuk menjamu tamu mereka selain menunjukkan selera konsumsi berdasar kelas sosial mereka, tetapi lebih dari itu selera konsumsi itu juga menunjukkan suatu bentuk pembedaan status sosial mereka dari kebanyakan orang. Perbedaan selera konsumsi itu, sekaligus merupakan upaya mereka mengkategorisasikan dirinya sebagai suatu kelas yang lebih tinggi statusnya dibanding orang lain, dengan menetapkan suatu standar estetika terhadap selera konsumsi. Bourdieu (1979: 100-101, 226) menjelaskan mengenai mekanisme dominasi di dalam praktek selera dan gaya hidup, di mana kelas yang dominan memproduksi standar estesisnya sebagai kelas dominan, dan dengan seketika itu juga mengklasifikasikan kelompok sosial lain di luar kelas mereka. Oleh karena itu maka selera terhadap musik atau tempat makan misalnya, tidaklah ditentukan berdasar pilihan otonom subjek melainkan suatu kecenderungan (*disposisi*) subjek yang juga dipengaruhi oleh suasana struktur ranah tempat subjek berada. Di

sinilah anggota DPR melakukan upaya penyesuaian diri dengan standar estetika dari kelas mereka, anggota DPR yang terhormat.

### **Jarak**

Dalam bagian awal bab ini, saya telah mengajak pembaca untuk mengenali jarak secara fisik untuk masuk ke dalam gedung para wakil rakyat. Jauhnya jarak pintu depan hingga ruang kantor, banyaknya pengamanan dari pintu depan hingga ruang kantor wakil rakyat. Jangankan rakyat biasa, bahkan orang-orang yang sering berinteraksi dengan DPR pun enggan dan segan dengan jarak itu.

Pada bagian ini saya ingin menambahkan jarak lain yang bersifat lebih administratif dan birokratik. Jarak fisik saja sudah jauh, belum lagi apabila kita hendak meminta bertemu anggota DPR baik di komisi maupun alat-alat kelengkapan DPR lainnya guna menyampaikan aspirasi kita. Kita akan menemui proses yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Proses yang tidak menyenangkan itu misalnya soal surat-menyurat. Untuk meminta audiensi, maka surat harus sampai jauh-jauh hari. Surat itu langsung ditujukan ke badan-badan/alat-alat kelengkapan misalnya komisi yang terkait bahkan juga pada fraksi yang dituju. Surat akan diterima sekretariat, lalu kita menunggu balasannya, diterima atau tidak, dan kapan waktunya. Pada kenyataannya tidak sesederhana itu proses yang biasa berlangsung. Kita bisa menunggu surat hanya dalam 1 minggu, tapi bisa terjadi juga suratnya menjadi berbulan-bulan dan tak terbalas.

Di komisi XX, sebuah surat permohonan audiensi mesti dikawal, artinya anggota DPR tertentu mesti terus-menerus menekankan kepada sekretariat komisi dan juga melakukan lobby kepada pimpinan komisi agar audiensi dapat segera terlaksana. Di komisi tersebut semua jadwal acara komisi selalu ditetapkan oleh pimpinan komisi, pimpinan komisilah yang menentukan prioritas acara dan jadwalnya. Nah dalam soal kebijaksanaan pimpinan komisi inilah interpretasi dan prakteknya menjadi sulit dipastikan. Banyak surat permohonan audiensi yang tidak dianggap prioritas, sementara surat-surat untuk keperluan tertentu dan diduga bertedensi kepentingan tertentu yang terkait dengan satu atau lebih pimpinan komisi mungkin saja dijadwalkan sebagai prioritas agenda komisi. Hampir tak jauh berbeda dengan di fraksi. Bedanya bagian sekretariat atau bagian

khusus pengaduan yang menentukan jadwalnya setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dan juga berkoordinasi dengan anggota DPR yang ditunjuk oleh fraksi untuk menerima audiensi yang dimintakan kelompok masyarakat.

Gara-gara proses yang panjang ini, beberapa kelompok masyarakat yang tidak sabar termasuk juga NGO seringkali berupaya mempercepat proses. Mereka kadang datang pada hari H, dan langsung minta bertemu dengan badan terkait dan fraksi tertentu. Seringkali yang terjadi komisi tetap tak mau menerima dengan berbagai alasan, sementara fraksi dengan segala cara akhirnya dapat dibujuk untuk menerima pengaduan aspirasi masyarakat, sebab hal itu berkait erat dengan kepentingan konstituen.

Ada pula cara lain untuk bertemu anggota DPR, salah satunya yang paling sering adalah dengan demonstrasi. Para demonstran seringkali meminta anggota DPR untuk mendatangi mereka di depan gerbang DPR, atau juga mengirimkan perwakilan mereka untuk menemui anggota DPR baik di komisi maupun fraksi-fraksi. Biasanya para demonstran telah berkomunikasi dengan anggota DPR dari fraksi tertentu untuk memfasilitasi agar mereka dapat diterima komisi/badan atau fraksi. Tanpa komunikasi itu sulit rasanya mereka dapat diterima masuk ke DPR dan bertemu komisi/badan atau fraksi yang dituju untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam kondisi khusus terutama apabila isue yang disampaikan dalam aksi demonstrasi masyarakat punya makna politis yang aktual dan banyak mendapatkan perhatian media, seperti dalam kasus Lapindo, maka justru anggota DPR yang antusias datang menemui demonstran.

Hanya saja memang tak banyak anggota DPR yang senang hati mau menemui demonstran di luar gerbang DPR, alasannya banyak, di antaranya, anggota DPR tidak tahu kalau ada aksi sebab gerbang luar DPR dengan tempat aktivitas perkantoran dan persidangan sangat jauh sehingga suara demonstran terdengar sayup atau bahkan nyaris tak terdengar, anggota DPR tidak punya hubungan komunikasi dengan kelompok demonstran sehingga tidak merasa punya kepentingan, atau dapat saja karena anggota DPR tertentu merasa kikuk untuk memberikan orasi di atas bak mobil terbuka. Seorang anggota DPR pernah

mengatakan kepada saya bahwa ia memang tak bisa berorasi di depan demonstran, sementara seorang pimpinan fraksi partai tertentu pernah saya lihat tidak mampu menaklukkan suara massa demonstran. Namun demikian masih dapat dijumpai beberapa anggota DPR yang senang hati menemui para demonstran atau bahkan turut serta dalam berdemonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Permadi dan Yacobus, keduanya dari Fraksi PDI Perjuangan, ikut serta dalam demonstrasi kenaikan BBM (bahan bakar minyak) tahun 2005 lalu. Mereka mengenakan baju hitam-hitam dan dengan semangat mengibar-kibarkan tongkat bendera yang terbuat dari bambu bersama-sama dengan para demonstran di Bunderan Hotel Indonesia. Sementara itu Syaifulloh Maksum dari Fraksi PKB dan Muspani dari DPD dapil Bengkulu berada bersama ribuan petani yang melakukan penolakan Perpres No 36 Tahun 2005 yang merupakan kebijakan pemerintah yang menyangkut pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum yang dikhawatirkan dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pengalihan paksa atas nama kepentingan umum dengan pengusuran. Yacobus terakhir kali saya dapati (2007) juga turut dalam demo mengenai nasib TKI/TKW di depan gedung kedutaan negara sahabat dan lagi-lagi bersama dengan Permadi (2008) terlibat aktif dalam penanganan kasus lumpur Lapindo.

Walau pun ada beberapa anggota DPR yang mudah ditemui bahkan turut serta dalam demonstrasi menyangkut kepentingan rakyat banyak, namun tetap saja sebagian besar menunjukkan kondisi betapa sulit bagi rakyat untuk mencapai para wakil rakyatnya. Pada paragraf sebelumnya telah tergambarkan setting yang tak ramah bagi rakyat hingga prosedur penyampaian aspirasi yang tak pasti. Gambaran di atas ini menunjukkan adanya kesan jarak secara simbolik antara rakyat dan wakil rakyatnya. Jarak simbolik itu muncul dalam bentuk kompleks gedung-gedung yang tinggi dengan pagar-pagarnya yang tinggi pula, terkesan angkuh. Belum lagi dengan pengamanan berlapis-lapis dari gerbang hingga ruang kantor anggota DPR. Ditambah dengan prosedur administrasi yang tak pasti dan berliku untuk bertemu/diterima DPR melalui badan/komisi maupun fraksi.

Untuk dihormati, harus ada jarak yang menyebabkan rasa segan. Bukan hanya jarak fisik gedung untuk dapat menemui mereka, melainkan juga soal birokrasi administratif yang rumit yang membuat jarak itu semakin terbentang. Antara rakyat dan anggota DPR ada persoalan mengenai jarak, sebagaimana digambarkan di atas. Jarak itu terjadi dalam dugaan saya karena persepsi bahwa anggota DPR itu memang berbeda dengan rakyat. Persepsi ini tidak serta-merta hanya diwacanakan oleh anggota DPR, melainkan juga dibenarkan oleh birokrasi di DPR dan juga masyarakat kebanyakan.

### **Layanan untuk Anggota DPR**

Anggota DPR memiliki staf yang mendukung kinerjanya sebagai wakil rakyat. Di antaranya adalah asisten pribadi, staf ahli fraksi yang diperbantukan pada setiap kelompok fraksi (poksi), staf ahli komisi atau staf ahli badan-badan kelengkapan DPR lainnya. Namun demikian staf yang senantiasa ada untuk setiap anggota DPR adalah asisten pribadi.

Rekrutmen staf, dalam hal ini asisten pribadi, juga didasarkan pada pertimbangan subjektif anggota DPR. Syarat sebenarnya ada, seperti misalnya harus S1. Namun syarat itu seringkali ditambahkan dengan atas persetujuan anggota DPR. Kata atas persetujuan anggota DPR itu artinya bahwa anggota DPR memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa staf yang akan direkrutnya. Jadi syarat itu sifatnya relatif saja, ada anggota DPR yang memperhatikan ketentuan itu, ada yang tidak peduli. Misalnya saja, banyak anggota DPR yang merekrut asisten pribadi, selanjutnya disingkat aspri yang berlatar belakang pendidikan S1. Malah di beberapa fraksi ada kriteria tambahan bahwa aspri haruslah merupakan kader partai juga. Bahkan tak jarang anggota DPR yang bersangkutan membantu asprinya untuk melanjutkan sekolah lagi, mengambil jenjang studi S2. Namun tak sedikit pula yang mengangkat aspri dengan latar belakang pendidikan yang tidak begitu tepat, misalnya salah satu yang saya temui, anggota DPR yang bersangkutan mengangkat aspri yang memiliki latar belakang sekolah penerbangan atau sekedar lulusan DIII. Selain itu, karena otoritas penentuan aspri ada pada anggota DPR, maka mereka juga tak jarang mengangkat istri, adik, anak,

keponakan, atau kerabatnya sebagai aspri yang bersangkutan. Seperti Bapak MM, ia mengangkat istrinya sendiri sebagai aspri, sementara Ibu JK memilih mengangkat anaknya.

Karena relatifitas persyaratan yang ada di tangan anggota DPR itu, maka jangan heran kalau aspri yang ada di lingkungan DPR ini juga macam-macam jenisnya. Ada yang merupakan kader partai, cerdas dan rajin, serta yang paling penting memahami betul bagaimana mendukung kinerja anggota DPR. Mereka inilah yang mendukung sebagian besar kinerja DPR dari menyiapkan bahan-bahan terkait kebijakan yang akan dibahas, menghubungkan anggota yang bersangkutan dengan kalangan pers, menyusun materi untuk seminar atau presentasi lainnya, hingga mengurus aktivitas kepartaian yang tak kalah penting bagi anggota DPR. Tetapi jangan heran juga bila melihat aspri terutama perempuan dengan mengenakan stocking, sepatu hak tinggi, dan make up yang hampir-hampir tak pernah luntur, berjalan mondar-mandir di DPR atau asyik ngobrol di kafetaria membicarakan soal model baju atau model handphone terbaru. Rata-rata pekerjaan mereka standar saja, mencatat dan mengingatkan jadwal bapak/ibu, mengurus pengambilan uang reses bapak/ibu, mengurus rekening ini itu, transfer uang ini itu hingga sesekali membuatkan minum.

Penampilan aspri itu penting, menurut salah seorang aspri, dianggap sebagai pencerminan anggota DPR yang bersangkutan juga. Ar misalnya, mengatakan kepada saya bahwa "Ibu" selalu memintanya berpenampilan rapi dan enak dipandang, sebab penampilan ia dianggap oleh "Ibu" mencerminkan kepribadian "Ibu." Itulah sebabnya Ar selalu berpenampilan rapi, sopan, dan enak dipandang. Aspri juga dianggap sebagai bagian pelengkapan atributif bagi anggota DPR yang bersangkutan.

Selain soal syarat, soal jumlah staf anggota DPR juga relatif. Sebenarnya setiap anggota DPR memiliki satu orang staf yang digaji oleh negara, yaitu asisten pribadi. Dahulu anggota DPR dibantu oleh staf kesekjenan DPR. Baru dalam akhir masa periode DPR lalu, anggota DPR memiliki tenaga pendukung, seorang asisten pribadi anggota DPR. Besaran gaji aspri adalah 15 % dari gaji anggota DPR. Semua anggota DPR memiliki satu staf yang dibiayai negara. Bila ia

menginginkan tambahan tenaga staf, maka ia semestinya membayar sendiri. Tetapi ada pula anggota DPR yang membagi gaji aspri dengan gaji sopir, atau bila punya dua asisten, anggota DPR membagi satu alokasi gaji untuk dua orang staf.

Para aspri ini terbiasa menyebut anggota DPR dengan panggilan Ibu atau Bapak, kadang Nyokap atau Bokap, suatu bentuk panggilan yang terpengaruh gaya paternalistik. Dari panggilan yang mencerminkan hubungan paternalistik itu sebenarnya sudah tersirat bahwa disini tidak ada mekanisme hubungan kerja yang profesional seperti antara buruh dan majikan. Juga sudah jelas bahwa *job description* aspri tidak punya standar yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Pekerjaan aspri ya tergantung pada interpretasi anggota DPR dan inisiatif aspri sendiri.

Pekerjaan para aspri sebagian besar adalah adalah pekerjaan administratif yang menunjang kinerja DPR, seperti mendokumentasikan berkas, mengurus surat-menyurat anggota DPR, menyiapkan bahan rapat. Akan tetapi pekerjaan aspri yang sesungguhnya menjadi sangat beragam, tergantung perintah Ibu atau Bapak. Ada aspri yang difungsikan seperti staf ahli yang menyusun bahan-bahan masukan untuk sidang, mengisi DIM (daftar inventarisasi masalah) yang merupakan bahan sangat vital dalam pembahasan rancangan undang-undang. Namun ada kalanya juga aspri punya pekerjaan sampingan seperti mengurus pembayaran rekening anggota DPR, mengambilkan uang resek, mengawal anggota DPR, menjadi asisten sekaligus sopir anggota DPR, sampai menyediakan minuman untuk Ibu atau Bapak, dan bahkan menenteng jas anggota DPR.

Seperti Tigor (bukan nama sebenarnya), seorang aspri, ia selalu mengenakan baju berwarna hitam. Kadang ia menjadi sopir, namun sekali waktu ia juga berada di kantor. Tetapi yang hampir dapat dipastikan di sana ada Bapak (anggota DPR yang dibantunya), di sana pula ada Tigor. Kata Tigor, tugas dia adalah mengawal Bapak. Ia pernah memprotes persoalan sekat lift, sebagai alasan adalah ia tak mungkin berpisah lift dengan Bapak.

DD memiliki 3 orang staf, satu di antaranya ia tempatkan sebagai sopir. Namun karena si sopir adalah juga pengurus partai dan sarjana, maka ia tak enak menyebutnya sopir. Ia menyebut jabatan sopirnya dengan sebutan staf. Namun

demikian defisini jabatan tetap saja sopir. Tidak pernah ada job deskripsi yang jelas, kontrak kerja yang jelas antara keduanya.

Di sinilah dimulai perbedaan persepsi antara anggota DPR dengan sopirnya. Bagi Ibu DD, tugas sebagai DD adalah sebagai sopir, walaupun demi rasa sopan santun dan perasaan tak enak, ia menyebutnya sebagai staf, suatu penyebutan yang ia setarakan dengan asisten pribadinya. Tapi tugas utama DD adalah sebagai sopir. Sopir itu tugasnya mengemudikan mobil dan menjaga kondisi mobil tetap baik seperti misalnya mencuci mobil, mengelap, dan sebagainya. Tapi di samping tugas utama itu, tugas tambahannya adalah mengawal Ibu. Kosakata mengawal artinya, Ibu ingin agar orang itu *standby* mengawalnya ke mana pun, baik di sidang dengan menunggui sidang, membawakan map, tas, bahan-bahan sidang, sampai mengantarnya ke kantor, ke tempat-tempat tujuan lain seperti di antaranya *mall* atau *carrefour*.

Suatu hari Ibu DD mengeluh, karena 'pengawalnya' itu sering ogah-ogahan mencuci mobil, ternyata hanya seminggu sekali, setiap harinya hanya dibersihkan dengan *sulak*. Sering setelah pulang mengantarnya dari kantor, langsung sopirnya pulang ke rumah saudara tempatnya tinggal, padahal ia masih mau menggunakan mobil ke tempat lain. Ia kesal karena sopirnya suka banyak cerita, mengaku-aku sebagai asprinya padahal asprinya bukan dia.

Pada intinya ia merasa tidak nyaman, sebab sopirnya tidak bertugas mengawal dia sebagaimana mestinya. Ia lebih senang dengan sopir sebelumnya yang lebih patuh, tidak banyak omong, jaga rahasia, pendiam, mudah diatur, dan rajin. Ia membandingkan kedua sopir itu, misalnya kalau sopir lama lebih rajin nyuci mobil, hampir setiap hari.

Sementara itu sopir tersebut pernah bercerita kepada saya mengenai persepsi dan tuntutananya terkait soal tugasnya. DD mengatakan bahwa antara ia dan Bos-nya tidak membuat kesepakatan yang jelas soal tugas pekerjaan. Ia lebih senang ditempatkan untuk nyopir dengan jam kerja sebagaimana layaknya jam orang kerja. Ia berharap Sabtu atau setidaknya Minggu libur. Itulah sebabnya ia sengaja pindah ke rumah saudaranya, sebab ketika ia tinggal di rumah Ibu, ia merasa harus melayani setiap hari termasuk waktu libur. Ia tidak terlalu menyukai

mengawal Ibu dalam pengertian Ibu yang harus menunggunya dalam rapat-rapat, berjaga di depan tempat sidang hingga selesainya sidang, atau menunggu di mobil sebagaimana yang dilakukan, sopir sebelumnya. Ia tidak senang melihat kebiasaan Ibunya yang seringkali setiap habis dari kantor ia mengajak ke *carrefour*, sedikit-sedikit ke *carrefour*, belanja.

Menunggu Bos di tempat rapat, menurutnya menghilangkan kesempatannya mendapatkan akses lain misalnya koneksi kepartaian. Ia juga mengeluhkan uang pendapatan yang sedikit menurutnya. Ia kemudian membandingkan dengan Bos-nya yang lama di daerah, seorang anggota DPRD yang sangat royal dan sering memberinya uang. Ia mengatakan pada saya bahwa ia menginginkan profesionalitas. Tentu saja tuntutan itu tak terpenuhi, hingga terakhir kali saya mengetahui bahwa ia telah diberhentikan.

Demikianlah, sebagai anggota DPR, mereka merupakan suatu kelas dominan yang selalu berusaha untuk memantapkan nilai budaya, standar-standar dan selera mereka kepada masyarakat. Sejauh ini setidaknya anggota DPR berhasil memantapkan standar mereka kepada asisten pribadinya, malah mereka juga berhasil membuat asisten-asisten mereka membangun interpretasi mengenai diri sendirinya berdasar interpretasi dari Bapak atau Ibu anggota DPR. Menurut saya ini sudah soal hegemoni kelas yang berjalan sedemikian rupa halusnyanya sehingga pihak yang disubordinasi justru menginternalisasi persepsi dari kelas yang mendominasi.

Bourdieu membantu saya menjelaskan ini dengan apa yang disebutnya sebagai kekerasan simbolik. Menurutnya, dominasi antar kelas beroperasi melalui suatu bentuk kekerasan simbolik yaitu suatu kekerasan yang halus. Bourdieu (2001: 1), Bourdieu (1990: 192) mensinyalir bahwa kekerasan ini menyembunyikan suatu dominasi dari kelas dominan kepada kelas yang lebih subordinat. Bekerjanya sangat halus, karena datangnya dari orang yang dianggap memiliki kedudukan terlegitimasi sehingga dianggap sebagai suatu hal yang absah. Dengan demikian kekerasan ini sesungguhnya menyembunyikan suatu hubungan kekuasaan antara pihak yang dominan dengan pihak yang tersubordinasi. Namun karena bekerjanya sangat halus, maka hubungan

kekuasaan yang timpang itu diterima sebagai suatu kewajaran. Ini adalah salah satu dari cara kerja kekerasan simbolik yaitu cara eufimisasi, kekerasan simbolik yang nyaris tak kelihatan dan mampu membuat pihak yang tersubordinasi menerimanya, sebagaimana diterangkan Thompson, B John dalam Bourdieu (1990: 19). Sedemikian halusnyanya sehingga pihak-pihak yang disubordinasi tidak melakukan resistensi dan menganggap bahwa seakan-akan itu terlegitimasi secara sosial. (Jenkins, Ricard, 1992: 104). Selain cara kerja yang halus dan diterima itu, cara kerja kekerasan simbolik juga dapat dilangsungkan melalui suatu mekanisme sensor dalam menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. (Bourdieu, 1990: 138).

Kembali pada konteks hubungan antara anggota DPR dengan para aspri, dalam kasus ini kedudukan terlegitimasi itu melekat pada diri anggota DPR, sehingga bentuk-bentuk konsep hubungan sosial antara anggota DPR dengan stafnya yang merupakan persepsi anggota DPR sendiri, justru diterima sebagai kebenaran yang absah, sehingga mereka yang didominasi secara tak sadar telah digiring menerima bahkan dalam kasus Tigor, menunjukkan mereka yang disubordinasi menginternalisasi konsep dari kelas yang dominan ke dalam dirinya. Bahkan kemudian, dalam kasus Tigor dan Ar, dibenarkan, diinternalisasi, dan direproduksi dalam tindakan memerankan penyesuaian kriteria kelas dominan oleh mereka yang disubordinasi.

Sementara itu bagi pihak tersadar, merasa bahwa ada ketimpangan, harus menyadari bahwa dirinya sedang melawan arus di mana pada gilirannya ialah yang harus tersingkir karena menentang apa yang dianggap sebagai umum dan sah itu, sebagaimana yang terjadi pada si sopir, tanpa pembelaan sama sekali. Penyingkiran ini adalah mekanisme sensor yang dilakukan untuk mengontrol opini umum dari pihak-pihak yang dominan.

Begitulah dalam keseharian di DPR, anggota DPR adalah pusat segala aktivitas, selain mereka segala urusan dianggap tidak terlalu penting. Saya menemukan salah satu bentuk prioritas perhatian kepada anggota DPR itu. Suatu hari saya ke perpustakaan DPR. Seorang perempuan agak gemuk di tempat peminjaman buku memasang wajah tidak menyenangkan. Ia mengatakan dengan

sedikit ketus, bahwa sebenarnya buku-buku dalam perpustakaan hanya dapat dipinjam oleh anggota DPR. Bila saya hendak meminjam buku, maka saya harus mendapatkan surat rekomendasi salah satu anggota DPR. Saya balik badan. Baru setelah saya menyodorkan surat seperti yang dimintanya, saya mendapatkan akses untuk membaca dan meminjam buku perpustakaan. Dalam soal lain tentu berlaku hal yang sama, bahwa yang penting adalah urusan atau kepentingan anggota DPR. Sekali sebut nama anggota DPR, Ibu atau Bapak, dengan segera staf pekerja (PNS) menyegerakan urusan bagi beliau anggota DPR terkait.

Layanan pada anggota DPR ternyata juga tak terbatas pada urusan dengan staf kesekjenan di DPR, bahkan anggota DPR menuntut layanan itu dalam berhadapan dengan pejabat pemerintah. Saya punya satu cerita soal ini. Dalam suatu sidang rapat kerja, Ketua BPN, Joyo Winoto sedang memaparkan langkah-langkah kinerjanya. Ia menjelaskan tentang peningkatan jumlah sengketa agraria, penanganan kasus *ad hoc*, dan lain-lain. Setahu saya, ini pemaparan mula tentang program kerja, pemaparan ini mengawali episode pembahasan anggaran.

Joyo mengatakan bahwa BPN telah mengirimkan dalam bentuk CD/*softcopy* semua anggaran BPN bahkan hingga ke anggaran BPN wilayah-wilayah (propinsi dan kabupaten/kota). Namun karena anggota DPR juga meminta dalam bentuk *hardcopy*, maka BPN juga telah mengirimkan copy semua bahan-bahan itu. Joyo mengatakan, "Saya telah mengirimkan dokumen-dokumen tertulis itu dengan 6 mobil *pick up*."

Sebenarnya dengan CD saja cukup, tetapi anggota DPR itu menurut dugaan saya ada dua sebab mengapa mereka merasa tak cukup penyajian bahan dengan CD, pertama mereka malas membuka CD atau kedua, mereka gagap teknologi. Yang pasti sebagian besar dari mereka tidak membaca CD yang dibagikan BPN. Anggota DPR meminta dokumen tertulis. Benar saja bila dokumen itu harus diangkut dengan 6 mobil *pick up* saking banyaknya.

Sebaliknya, saya mendapati dalam ruangan kerja salah seorang anggota komisi II beberapa bendel tebal yang kalau dibawa terasa sangat berat. Pertanyaannya adalah, apakah dengan dokumen tertulis yang dimintanya itu anggota DPR juga membacanya. Bisa dipastikan sebagian besar tidak

membacanya. Seperti anggota DPR yang sedang saya kunjungi ruangan kantornya ini. Ia tidak membaca selebar pun bundelan itu, yang ia mintakan untuk diantarkan stafnya hanyalah dokumen ringkas yang merupakan pengantar/penjelasan naratif dari kepala BPN mengenai anggaran. Kalau demikian untuk apa *copy* dokumen sebanyak itu ?

Bagian terakhir ini menunjukkan bahwa mereka yang karena kedudukannya sebagai anggota DPR yang terhormat itu, menuntut banyak layanan dan *previledge* dalam lingkungannya, bahkan dari pejabat negara yang berkaitan dengan bidang kerja mereka. Tuntutan layanan dan *previledge* anggota DPR tersebut sepertinya dibenarkan melalui sikap dan persepsi orang-orang di lingkungan DPR. Sesungguhnya ini adalah suatu hubungan kekuasaan, pihak yang dominan mempunyai legitimasi yang dianggap melekat dalam status kedudukannya sebagai anggota DPR dan karenanya berhak atas layanan dan *previledge*. Hubungan kekuasaan antara anggota DPR dengan Kepala BPN dalam kasus ini direpresentasikan melalui bahasa, yaitu permintaan dokumen tertulis BPN.

Saya merasa lebih tepat mendekati kejadian ini dari penjelasan Bourdieu mengenai bahasa, sebab para pemikir lain yang mempelajari bahasa seringkali, mereka sibuk menjelaskan bahasa dalam kerumitan bahasa itu sendiri, sehingga bahasa menjadi terasing dalam diri bahasa itu sendiri. Di sini penjelasan linguistik saja tidak tepat menjelaskan relasi kekuasaan dalam bahasa. Bourdieu (1991) menempatkan kekuasaan di dalam pembahasannya mengenai bahasa. Thompson, B John (1991: 1) mengatakan bahwa bahasa bagi Bourdieu merepresentasikan hubungan kekuasaan antar subjek. Dengan demikian bahasa tidak bermain di dalam ruang yang netral, melainkan selalu ada unsur kekuasaan di dalamnya. Sebagaimana pendapat Bourdieu (1991: 37) bahwa di dalam peristiwa pertukaran bahasa, di sana terdapat relasi kekuasaan. Pertukaran bahasa berhubungan dengan kekuasaan simbolik di mana ada aktualisasi hubungan kekuasaan antara penutur atau respektif grup mereka. Ada format dominasi di dalam pertukaran bahasa.

Bahasa memang jelas tidak berdiri sendiri sebagai susunan tata bahasa saja, melainkan terhubung oleh suasana di luar bahasa itu sendiri. Otoritas yang

ada dalam bahasa tidak berasal hanya dari bahasa itu sendiri, melainkan berasal dari kekuatan- kekuatan di luar bahasa yang mempengaruhi si penutur bahasa. (Fashri, Fauzi, 2007: 119). Salah satu kekuatan eksternal bahasa dalam hal ini adalah status yang di dalamnya melekat otoritas untuk menyampaikan ujaran, demikian ditegaskan Thompson, B John, dalam Bourdieu (1991: 8-9).

Dalam konteks komunikasi anggota DPR dan Kepala BPN, terlihat bahwa otoritas bahasa melekat pada unsur si penuturnya. Makna kekuasaan yang terdapat dalam ucapan anggota DPR kepada Kepala BPN, sesungguhnya melekat pada status otoritas si penutur sebagai anggota DPR. Disini nampak bahwa bahasa tidak berada dalam kesunyian di dalam bahasa itu sendiri melainkan terikat di dalam situasi eksternalnya, pada status dan otoritas si pengucapnya. Hanya karena otoritas penuturnya, anggota DPR, maka tuturan yang disampaikannya memiliki *power*. Melalui itu, maka Kepala BPN bertindak mengirimkan 6 mobil *pick up* berisi dokumen tertulis. Tanpa status dan otoritas si penutur sebagai anggota DPR musykil kalimat permintaan dokumen tertulis itu akan dipenuhi oleh Kepala BPN. Tanpa dilekatkan pada status dan otoritas penuturnya maka kalimat permintaan itu tidak mempunyai kekuatan paksa (*powerless*) bagi orang lain untuk memenuhinya.

Contoh-contoh di atas menunjukkan adanya praktek dominasi di dalam bahasa yang ditunjukkan oleh anggota DPR yang memiliki kekuasaan dalam relasinya dengan lingkungan seperti dalam peristiwa komunikasi sehari-hari dengan para asisten mereka, atau bahkan dalam relasi kelembagaan antara DPR dengan pemerintah. Seperti dalam cerita mengenai hubungan aspri dengan anggota DPR di atas, tugas asisten adalah mengawal anggota DPR. Unsur kekuasaan dari si penutur bahasa yaitu anggota DPR membuat para asisten kemudian membenarkan makna 'mengawal', bahkan aspri sendiri kemudian bertindak dan berperilaku mengawal, ke mana saja anggota DPR berada ia menemani, dalam ruang sidang ia menunggui, membawakan bahan, menenteng tas, bahkan harus menemani masuk lift. Perilaku menterjemahkan "tugas mengawal" merupakan bentuk internalisasi dan reproduksi konsep mengenai 'tugas mengawal' yang dituturkan anggota DPR.

Hubungan kekuasaan juga muncul antara dua institusi negara, pemerintah dan DPR. Relasi kekuasaan DPR dengan pejabat pemerintah memainkan peran dalam bahasa 'permintaan bahan dalam bentuk tertulis' yang kemudian membuat seorang pejabat pemerintah seperti Kepala BPN harus bertindak mengirimkan dokumen tertulis sebanyak 6 mobil *pick up*, hanya untuk memenuhi tuntutan para anggota DPR. Sekali lagi menunjukkan adanya unsur relasi kekuasaan yang memainkan peran melalui bahasa dalam relasi kekuasaan antara dua institusi negara, DPR dan pemerintah. Di sini lagi-lagi bahasa memerankan peranan penting dalam memanifestasikan relasi kekuasaan antara anggota DPR dengan lingkungannya.